

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perekonomian seringkali membuat seseorang melakukan tindakan apapun guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagian masyarakat ponorogo memilih membuat usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu usaha yang menjadi pilihan sebagian masyarakat adalah memilih menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Jalur pekerjaan alternatif yang dipilih sebagian masyarakat tersebut memang bermodal tidak terlalu besar, namun seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak PKL di ponorogo maka semakin kuat persaingan usaha mereka. Sehingga tidak sedikit dari PKL yang memilih berjualan di tempat-tempat strategis seperti halnya di tepi jalan umum maupun di trotoar. Di satu sisi penggunaan tempat ini cukup efektif dalam strategi penjualan namun pada sisi yang lain penggunaan trotoar atau badan jalan sebagai tempat berjualan mengganggu ketertiban umum karena trotoar memiliki fungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki dan tepi jalan sebagai jalur lalu lintas kendaraan, seperti halnya yang dilakukan pedagang kaki lima yang ada di kawasan jalan sultan agung ponorogo yang saat ini menjadi polemik bagi pemerintah kabupaten Ponorogo dengan pedagang kaki lima tersebut.

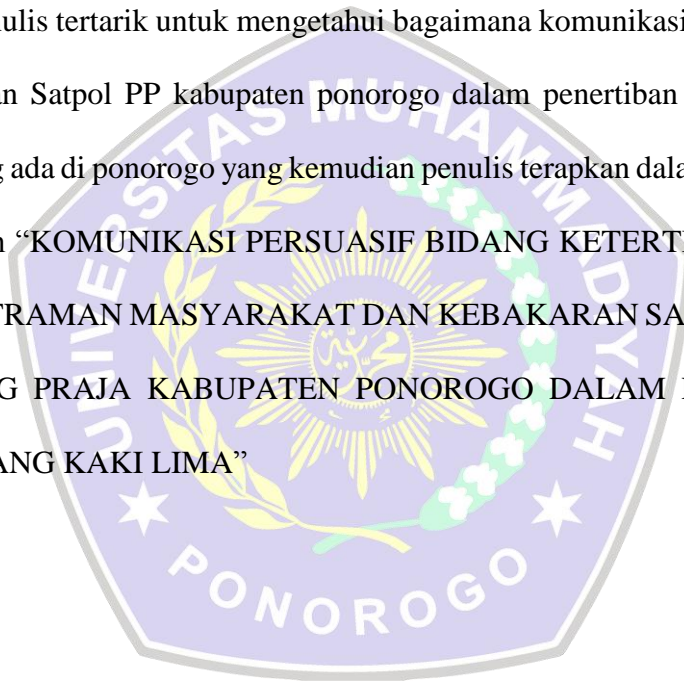
Dalam hal ini satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kabupaten ponorogo sudah tentu menjadi bagian yang bersinggungan langsung dalam penertiban masyarakat dikabupaten ponorogo. dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Satpol PP sebagai lembaga pembantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan daerah membutuhkan sebuah komunikasi yang baik, baik itu digunakan dalam sosialisasi kebijakan pemerintah daerah maupun dalam penertibannya.

Komunikasi menurut Hovland, Janis dan Kelley dalam (Muhammad, 2004) dapat didefinisikan bahwa komunikasi adalah proses seseorang memberikan rangsangan atau sinyal dengan menggunakan pesan berbentuk verbal dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku orang lain. Dari definisi tersebut bisa menggambarkan bahwa tugas dari Satpol PP salah satunya adalah untuk mengubah tingkah laku PKL yang ada di ponorogo untuk tertip menjaga ketertipan umum yang sesuai dengan peraturan daerah ponorogo melalui sebuah komunikasi yang baik.

Fungsi maupun tujuan komunikasi itu sendiri selain bersifat informatif namun juga harus memiliki fungsi persuasif. Menurut (Rudy, 2005) pada dasarnya komunikasi bersifat komunikatif dan infomatif, yaitu dengan adanya persamaan makna, mengerti bahasa yang digunakan dan mengerti akan objek serta makna yang dibicarakan serta memberi pengertian/pemahaman yang bermanfaat bagi khalayak/komunikan. Sedangkan makna kata infomatif menurut Onong Uchjana Effendy dalam buku yang sama (Rudy, 2005) dijelaskan bahwa informatif adalah sifat memeberikan penjelasan pada pesan

yang dikomunikasikan seseorang kepada orang lain. Sedangkan komunikasi yang bersifat persuasif disini T. May Rudy dalam bukunya “*komunikasi & hubungan masyarakat internasional*” disampikan bahwa yang dimaksud persuasif adalah usaha mempengaruhi pendapat, sikap dan tingkah laku yang dilakukan dalam bentuk bujukan-bujukan atau ajakan-ajakan.

Pelaksanaan komunikasi sudah tentu membutuhkan cara tertentu atau metode serta tahapan tertentu untuk mencapai hasil atau tujuan yang dirapkan, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang di lakukan Satpol PP kabupaten ponorogo dalam penertiban pedagang kaki lima yang ada di ponorogo yang kemudian penulis terapkan dalam sebuah judul penelitian “KOMUNIKASI PERSUASIF BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PONOROGO DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah yang penulis tuangkan dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana metode komunikasi persuasif bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kebakaran satuan polisi pamong praja kabupaten ponorogo dalam penertiban pedagang kaki lima?
2. Bagaimana perubahan sikap yang dialami PKL setelah adanya penertiban pasal 10 pasal 10 perda 5 tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode komunikasi persuasif bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kebakaran satuan polisi pamong praja kabupaten ponorogo dalam penertiban pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui perubahan sikap yang dialami PKL setelah adanya pasal 10 pasal 10 perda 5 tahun 2011

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian kali ini diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai metode serta tahapan komunikasi persuasif. Selain itu penulis juga berharap hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan referensi ataupun literatur ilmiah bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan strategi komunikasi persuasif.

2. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis pada penelitian ini juga di harapkan hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan evaluasi bagi bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kebakaran Satpol PP kabupaten ponorogo dalam penertiban perda di kabupaten ponorogo.